



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163/KEPMEN-KP/SJ/2015

TENTANG

RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian dan efektivitas pelaksanaan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2013, perlu menetapkan rencana kebutuhan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
11. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016, yang selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan verifikasi permohonan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya.
- KETIGA : Bagi unit kerja eselon I yang tidak dapat merealisasi sesuai dengan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan bulan September tahun berjalan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan mengalihkan sisa kuota kepada unit kerja eselon I lain sesuai skala prioritas.
- KEEMPAT : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan menyusun evaluasi pelaksanaan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar pada tahun berjalan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163/KEPMEN-KP/SJ/2015
TENTANG
RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

(1)	(2)	(3)	PROGRAM PENDIDIKAN						
			TAHUN 2016						
			D.III	D.IV	D.IV s	S1	S2	S3	
			(4)						
A	SEKRETARIAT JENDERAL								
	1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 2. Bidang Teknis dan Fungsional	1	Ekonomi Kelautan	0	0	0	0	8	1
		2	Ekonomi Sumber Daya Kelautan Tropika						
		3	Ilmu Hukum						
		4	International Relations						
		5	Kebijakan Publik						
		6	Manajemen						
		7	Manajemen Pembangunan Daerah						
		8	Manajemen Perencanaan Kebijakan Publik						
		9	<i>Maritime and Trade Law</i>						
		10	Perencanaan Wilayah						
		11	<i>Public Policy/Urban Regional Planning</i>						
		12	Sosial Politik						
		13	Statistik						
		14	Teknologi Informasi						
		15	<i>Environmental, Marine Science and Technology Studies</i>						
		16	Ilmu Kelautan						
		17	Manajemen Sumber Daya Pantai						
		18	<i>Master Of Coastal And Ocean Policy</i>						
		19	<i>Master Of Fisheries Management</i>						
		20	<i>Master Of Marine Affairs</i>						
TOTAL SETJEN				0	0	0	0	8	1
B	INSPEKTORAT JENDERAL								
	1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 2. Bidang Teknis dan Fungsional	1	Ilmu Akuntansi	0	0	0	0	2	1
		2	Ilmu Perikanan/Kelautan						
		3	Pengelolaan Sumber Daya Laut (PSL)/Pesisir						
TOTAL ITJEN				0	0	0	0	2	1
C	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT								
	1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 2. Bidang Teknis dan Fungsional	1	Hukum Internasional	0	0	0	0	8	1
		2	Ilmu Ekonomi						
		3	Perencanaan dan Kebijakan Publik						
		4	Biologi/Ekologi Laut						
		5	GIS/Geografi						
		6	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan						
		7	Perencanaan Wilayah dan Kota						
		8	Perubahan Iklim						
		9	Praktek Pembangunan Ekowisata/Pengembangan Wisata						
		10	Teknik Hidrologi						
		11	Teknik Oceanografi						
		12	Teknik Pertambangan						
		13	Teknik Sipil Pantai						
TOTAL DITJEN PRL				0	0	0	0	8	1
D	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP								
	1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan	1	Ekonomi dan Manajemen	0	0	2	1	16	3
		2	Ilmu Hukum						

NO	BIDANG PEKERJAAN/KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN TUGAS BELAJAR	JENIS KETERAMPILAN, KEMAMPUAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN	PROGRAM PENDIDIKAN					
			TAHUN 2016					
			D.III	D.IV	D.IV s	S1	S2	S3
(1)	(2)	(3)	(4)					
	2. Bidang Teknis dan Fungsional	3 Teknik Informatika 4 <i>Civil and Environmental Engineering</i> 5 <i>Environment and Life Science</i> 6 Ilmu Kelautan dan Perikanan 7 <i>Marine Affairs</i> 8 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) 9 <i>Ocean Engineering</i> 10 <i>Oceanography</i> 11 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan/Perairan 12 Teknik Lingkungan 13 Teknik Mesin 14 Teknik Perkapalan 15 Teknik/Teknologi Kelautan 16 Teknologi Hasil Perikanan						
TOTAL DITJENKAN TANGKAP			0	0	2	1	16	3
E DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA								
	1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 2. Bidang Teknis dan Fungsional	1 Hubungan Internasional 2 Manajemen 3 Perencanaan dan Kebijakan Publik 4 <i>Aquatic Animal Diseases</i> 5 Biologi 6 Bioteknologi 7 Budidaya Perikanan/Perairan 8 Genetika Ikan 9 Ilmu Akuakultur 10 Ilmu Lingkungan 11 Ilmu Perikanan dan Kelautan 12 Manajemen Perikanan 13 Manajemen SD Perikanan/Perairan 14 Manajemen Sumber Daya Pantai 15 Nutrisi 16 Pendidikan Profesi Dokter Hewan 17 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 18 Pengelolaan Sumber Daya Perairan 19 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 20 Perencanaan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan 21 Reproduksi Ikan 22 Teknologi Akuakultur	0	1	0	1	18	3
TOTAL DITJENKAN BUDIDAYA			0	1	0	1	18	3
F DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 2. Bidang Teknis dan Fungsional	1 Bisnis Internasional dan Kajian Eropa 2 Ilmu Ekonomi 3 Ilmu Hukum 4 Ilmu Manajemen 5 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 6 Magister Profesional Industri Kecil 7 Manajemen Logistik 8 Bioteknologi 9 Ilmu Kelautan 10 Ilmu Perikanan 11 Teknologi Kelautan 12 Teknologi Pangan/Teknologi Hasil Perikanan	0	0	0	0	5	1
TOTAL DITJEN PDSPPK			0	0	0	0	5	1

G. DIREKTORAT ...

NO	BIDANG PEKERJAAN/KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN TUGAS BELAJAR	JENIS KETERAMPILAN, KEMAMPUAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN	PROGRAM PENDIDIKAN					
			TAHUN 2016					
			D.III	D.IV	D.IV s	S1	S2	S3
(1)	(2)	(3)	(4)					
G	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan	1 Ilmu Hukum	0	0	2	0	13	1
		2 Kebijakan Publik						
		3 <i>Master of Law</i>						
	2. Bidang Teknis dan Fungsional	4 Arkeologi						
		5 Budidaya Perairan						
		6 Ilmu Kelautan						
		7 Manajemen Sumber Daya Perairan						
		8 Manajemen Sumber Daya Pantai						
		9 <i>Master of Marine Management and Affair</i>						
		10 <i>Master of Marine Science and Management</i>						
		11 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan						
		12 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan						
		13 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan						
		14 Pengelolaan Sumber Daya Perairan Lingkungan						
		15 Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan DAS						
		16 Permesinan Perikanan						
		17 Teknik Kelautan						
		18 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap						
		19 Teknologi Hasil Perikanan						
		20 Teknologi Penangkapan Ikan						
		21 Teknologi Perikanan Laut						
	TOTAL DITJEN PSDKP		0	0	2	0	13	1
H	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan	1 <i>Doctor of Philosophy</i>	0	0	0	0	14	7
		2 Ilmu Hukum						
		3 Teknologi Informasi untuk Perpustakaan						
	2. Bidang Teknis dan Fungsional	4 Akuakultur						
		5 Antropologi						
		6 Biologi/Illmu Biologi						
		7 <i>Environmental Science</i>						
		8 <i>Fisheries Management</i>						
		9 <i>Geoscience</i>						
		10 Ilmu Fisika						
		11 Ilmu Kelautan						
		12 Ilmu Lingkungan						
		13 Ilmu Pangan						
		14 Manajemen Sumber Daya Perikanan						
		15 <i>Marine Environment</i>						
		16 Pengelolaan Sumber Daya Perairan						
		17 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan						
		18 <i>Sains Agribisnis</i>						
		19 Teknik Pertanian						
		20 Teknologi Perikanan Laut						
	TOTAL BALITBANG KP		0	0	0	0	14	7
I	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan	1 Akuntansi	0	1	0	0	21	5
		2 Ilmu Administrasi Publik						
		3 Manajemen						
		4 Manajemen Pendidikan Tinggi						
		5 Sains Manajemen						
	2. Bidang Teknis dan Fungsional	6 <i>Bioscience, Fisheries and Economy</i>						

NO	BIDANG PEKERJAAN/KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN TUGAS BELAJAR	JENIS KETERAMPILAN, KEMAMPUAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN	PROGRAM PENDIDIKAN						
			TAHUN 2016						
			D.III	D.IV	D.IV s	S1	S2	S3	
(1)	(2)	(3)	(4)						
		7 Bioteknologi							
		8 <i>Fisheries Product Value Chain</i>							
		9 <i>Fisheries Studies</i>							
		10 Ilmu Akuakultur/Budidaya Perairan							
		11 Ilmu Kelautan/Teknik Kelautan							
		12 Ilmu Penyuluhan Pembangunan							
		13 Ilmu Perairan							
		14 Manajemen Sumber Daya Pantai/ Pengelolaan Sumber Daya Perairan/ Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan							
		15 <i>Marine Biotechnology</i>							
		16 Mikrobiologi							
		17 <i>Natural Resources Management</i>							
		18 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan							
		19 Perencanaan Wilayah dan Kota							
		20 Permesinan Perikanan							
		21 Teknik Mesin							
		22 Teknologi Hasil Perairan							
		23 Teknologi Hasil Pertanian							
		24 Teknologi Perikanan Laut							
TOTAL BPSDMP KP			0	1	0	0	21	5	
J BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN									
	1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan	1 Administrasi Publik/Negara	0	3	0	3	18	2	
		2 Akuntansi							
		3 Ekonomi							
		4 Hukum							
		5 Manajemen Keuangan							
		6 Manajemen SDM							
		7 Sistem Informasi							
		8 Teknik Informatika/Komputer							
	2. Bidang Teknis dan Fungsional	9 Bioteknologi							
		10 Budidaya Perairan							
		11 Budidaya Perikanan/Akuakultur							
		12 Ilmu Lingkungan							
		13 Ilmu Perikanan							
		14 Mikrobiologi/Biologi Molekuler							
		15 MIPA-Ilmu Kelautan							
		16 Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Perairan							
		17 <i>Sains Veteriner</i>							
		18 Teknologi Hasil Perikanan							
		19 Teknologi Pangan/ <i>Food Science & Nutrition</i>							
TOTAL BKIPM			0	3	0	3	18	2	
TOTAL PER PROGRAM PENDIDIKAN			0	5	4	5	123	25	
TOTAL RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR KKP			162						

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

